

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun
2011-2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RENDY IRAWAN YUNIZAR
NIM. C2C009077

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rendy Irawan Yunizar

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009077

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GORVENANCE DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN**

Dosen Pembimbing : Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt

Semarang, 19 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt)

NIP. 197205112000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rendy Irawan Yunizar

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009077

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME CORPORATE
GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal Agustus 2014

Tim Penguji

1. Shiddiq Nur Rahardjo,SE,M.Si,Akt ()
2. Dr.Endang Kiswara,M.Si,Akt ()
3. Dul Muid,SE,M.Si,Akt ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rendy Irawan Yunizar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2011-2012) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rendy Irawan Yunizar)
NIM : C2C009077

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of board size, the proportion of independent board, audit committee, board meetings, audit committee meetings, block holder ownership of the company's financial performance [RETURN ON ASSET]

The population of this study are the entire manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2012. This study is as much as 122 companies. Sampling was done using purposive sampling technique.

These result of the study indicate that board size, the proportion of independent board, audit committee, board meetings, block holder ownership give significantly affect the company's financial performance. while meeting the audit committee doesn't have a significant effect on the company financial performance.

Keywords: ROA, board size, the proportion of independent board, audit committee, board meetings, audit committee meetings, block holder ownership

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, aktivitas dewan komisaris, aktivitas komite audit, kepemilikan block holder terhadap kinerja keuangan perusahaan[RETURN ON ASSET]

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 122 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, pertemuan dewan komisaris, kepemilikan block holder berpengaruh significant terhadap kinerja keuangan perusahaan . sedangkan pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh significant terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci : ROA, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, pertemuan dewan komisaris, pertemuan komite audit, kepemilikan block holder

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Al-Quran surat Ibrahim : ayat 7

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur , pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

Tetaplah menjadi pribadi yang sederhana dan selalu melihat kebawah, dengan begitu kita akan selalu bersyukur dengan apa yang telah kita punya sekarang.

Seorang pemenang yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu melawan amarahnya dgn kesabarannya, dan memaafkan dengan ketulusan.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

**Kedua orangtua ku yang
dengan ikhlas merawatku
dari aku kecil sampai
sekarang dan selalu
senantiasa mendoakanku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'alam, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul "**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**" ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat kepada penulis.
3. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa M.S . selaku Dosen Wali.
4. Kedua orangtua ku tercinta. Terimakasih untuk kasih sayang, perjuangan, perhatian serta doa yang selalu diberikan untuk kesuksesan penulis.
5. Kedua adiku tercinta. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

6. Marchelina Putri Savitri pacarku tercinta. Terima kasih sayang atas dorongan dan motivasi yang telah engkau berikan.
7. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler I angkatan 2009. Terima kasih untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah.
8. Teman-teman Revani, Konny, Giska, Annisa, Ayu, alit, alpriza, teman-teman kkn pagergunung. Terima kasih atas dukungan, canda, tawa yang telah berikan selama ini.
9. Teman-teman kost Lacitadelle. deffa, Tito, Rendi, Farhat, Krisna, Andri, kris, adit, reza. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah menemani ku dikost.
10. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian berikan.

Penulis memohon maaf sekiranya penyajian maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Juni 2014
Yang membuat pernyataan,

(Rendy Irawan Yunizar)
NIM : C2C009077

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iiI
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 Corporate Governance.....	15
2.1.2.1 Definisi Corporate Governance	15
2.1.2.2 Asas Corporate Governance.....	17
2.1.2.3 Tujuan Corporate Governance	19
2.1.2.4 Manfaat Corporate Governance	20

2.1.3 Mekanisme Corporate Governance	21
2.1.3.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	22
2.1.3.2 Ukuran Komite Audit.....	23
2.1.3.3 Aktivitas Komite Audit	25
2.1.3.4 Large Blockholder	28
2.1.4 Ukuran Perusahaan	29
2.1.5 Kinerja Keuangan Perusahaan.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	44
2.4 Perumusan Hipotesis	45
2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap	46
Kinerja Keuangan Perusahaan	
2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja.....	48
2.4.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit Terhadap Kinerja	50
Keuangan Perusahaan	
2.4.4 Pengaruh Large Blockholder Terhadap Kinerja.....	50
Keuangan Perusahaan	
 BAB III METODE PENELITIAN	 52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	52
3.1.1 Variabel Dependen	52
3.1.2 Variabel Independen	53
3.1.3 Variabel Kontrol	55
3.2 Populasi dan Sampel.....	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	58
3.5 Metode Analisis	58
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	58
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.5.2.1 Normalitas	59
3.5.2.2 Heteroskedastisitas.....	60

3.5.2.3 Multikolinearitas.....	61
3.5.2.4 Autokorelasi	61
3.5.3 Pengujian Hipotesis	62
3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	63
3.5.4.1 Uji Statistik F.....	64
3.5.4.2 Uji Statistik t.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Statistik Deskriptif	67
4.2 Analisis Data	68
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	69
4.2.2.1 Normalitas	69
4.2.2.2 Multikolinieritas	70
4.2.2.3 Heteroskedastitas.....	71
4.2.2.4 Autokorelasi	72
4.2.2 Analisis Regresi.....	73
4.2.3.1 Overall Test	74
4.2.3.2 Koefisien Determinasi.....	74
4.2.3.3 Pengujian Hipotesis.....	75
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap ROA.....	77
4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen Terhadap ROA	78
4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA	78
4.3.5 Pengaruh Pertemuan Komite Audit Terhadap ROA.....	79
4.3.4 Pengaruh Blockholder Terhadap ROA	79
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan	82

5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	40
Tabel 3.1 Definisi Operasional	56
Tabel 4.1 Perincian Sampel	66
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	67
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas I.....	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas II.....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	72
Tabel 4.8 Hasil Model Regresi	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Model Fit	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi R^2	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	45
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Statistik Deskriptif	88
Lampiran B Uji Normalitas	89
Lampiran C Uji Multikolinieritas	90
Lampiran D Uji Heteroskedastisitas	91
Lampiran E Uji Autokorelasi	92
Lampiran F Uji Model Fit.....	93
Lampiran G Koefisien Determinasi	94
Lampiran H Uji t	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajer berkewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan seringkali menimbulkan masalah (*agency problem*). Masalah ini disebabkan oleh kepentingan yang saling bertentangan antara pihak prinsipal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan manajemen atau agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal). Kepentingan atau motivasi yang berbeda tersebut dapat menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain dengan berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Hal itu disebabkan adanya pemikiran bahwa setiap orang memiliki perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self interest behavior* (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Salah satu langkah yang diperlukan untuk membantu dalam mengurangi masalah keagenan yang muncul adalah dengan cara melakukan pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan hal yang dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* (termasuk pemerintah, karyawan, konsumen dan *stakeholders* lainnya). Dua hal yang menjadi perhatian

utama konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Permasalahan yang timbul dalam GCG merupakan akibat adanya masalah keagenan yang muncul dalam suatu organisasi. Mekanisme yang dipakai dalam *good corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu struktur kepemilikan (blockholder), komite audit, komisaris independen. Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007) Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Struktur kepemilikan sendiri juga merupakan bagian dari control bagi manajer. Kepemilikan saham blockholder menjadi salah satu sudut pandang dari pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Berkaitan dengan struktur kepemilikan blockholding, terjadi perbedaan kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu pihak *controlling* (yang mengendalikan keputusan manajemen) dan *minority shareholders* (Hastuti, 2005). Kegiatan memanipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimalkan melalui monitoring yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai kepentingan tersebut. Melalui peran monitoring oleh blokholder, dewan komisaris (board of directors) serta memaksimalkan fungsi komite audit yang ada dalam perusahaan (Barnhart & Rosenstein, 1998 dalam Herawaty 2008).

Keberhasilan dari penerapan GCG tentunya tak lepas dari kebutuhan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, dimana salah satunya adalah dengan dicapainya laba yang besar oleh perusahaan. Laba adalah indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Siallagan, 2006). Kreditur dan investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba di masa yang akan datang. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen perusahaan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Jika laba seperti ini digunakan investor untuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya.

Kinerja perusahaan yang baik akan membawa investor yakin dan percaya dalam menanamkan dananya yang akan memberikan keuntungan di masa mendatang dan dapat membantu pengambilan keputusan-keputusan bisnis yang tepat. Laba yang tinggi dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi jika laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang terbaik.

Kajian empiris mengenai hubungan penerapan *good corporate governance* terhadap sebagai salah satu faktor yang penting bagi tercapainya kinerja perusahaan yang lebih baik telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang *corporate governance* di tingkat perusahaan sebagian besar telah dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sanda, et.al (2005) mengungkap mekanisme GCG seperti Kepemilikan saham direksi, ukuran dewan direksi, komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan saham untuk memprediksikan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, PER dan Tobins Q. Hasil penelitian memberikan gambaran yang berbeda dari pengaruh masing-masing variabel dimana terhadap ROA variabel yang berpengaruh adalah kepemilikan direksi (negatif), ukuran dewan (positif) dan konsentrasi kepemilikan (negatif).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ehikioya (2007) yang menggunakan lebih banyak mekanisme GCG dalam penelitiannya terhadap kinerja perusahaan (ROA, ROE, PER dan Tobins Q) juga memberikan hasil yang bervariasi. Variabel mekanisme GCG yang mempengaruhi ROA adalah konsentrasi kepemilikan saham

(positif), kepemilikan saham direksi (negatif), Ukuran dewan (positif), komisaris independen (negatif), keahlian dewan (negatif), dan dualism CEO (negatif). Dan penelitian Abor dan Biekpe (2007) mengenai pengaruh beberapa variable mekanisme GCG terhadap ROA mendapatkan bahwa variabel yang signifikan adalah ukuran dewan (positif), komposisi dewan (positif), keahlian manajemen (positif), keahlian direksi (positif), kepemilikan insider (positif), kepemilikan keluarga (positif) dan kepemilikan asing (positif).

Namun penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) meneliti pengaruh yang signifikan antara praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik *corporate governance*.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil yang bervariasi dalam penggunaan prinsip mekanisme GCG dalam penelitian empiris. Beberapa konsep bahkan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia misalnya mengenai dualism CEO yang tidak dikenal di pasar modal Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) dan Ehikioya (2007) tentang praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sedangkan variabel independennya adalah praktik *corporate governance* yang diprosikan oleh struktur kepemimpinan dewan, dewan komite, rapat direksi, dan proporsi komisaris independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) adalah variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, pertemuan dewan komisaris, pertemuan komite audit dan kepemilikan blockholder.

Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini dapat memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan melihat tingkat *Return On Asset* (ROA) maka dapat diukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit perusahaan, yang juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para manajer untuk membuat keputusan. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang akan digunakan sebagai predictor. mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu: komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, pertemuan komisaris, pertemuan komite audit, kepemilikan blockholder dan ukuran perusahaan. Penelitian ini memilih variable-variable tersebut karena dianggap dapat mewakili konsep pengawasan internal dari komisaris, komite audit dan kepemilikan saham pengendali. Sedangkan konsep jumlah pertemuan dinilai merupakan aktivitas nyata dari komisaris dan komite audit dalam tindakan pengawasannya.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Fama dan Jensen (1983 dalam Nur, 2007) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen atau eksternal dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost* dan meningkatkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) dan Rini (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Achchuthan dan Kajanathan (2012), Sam'ani (2008), dan Sibarani (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999 dalam Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen serta semakin efektif memaksimalkan kinerja perusahaan dalam

menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011), Sibarani (2010), dan Sari (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal, eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan mereduksi biaya agensi dan meningkatkan kontrol internal yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008), Sekaredi (2011) dan Rini (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Blockholder atau saham pengendali juga menjadi salah satu elemen mekanisme GCG yang berkaitan dengan jumlah saham terbesar. Konsentrasi yang besar dari pemegang saham cenderung menciptakan lebih banyak tekanan kepada manajer untuk dapat memaksimalkan nilai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu terjadi *research gap* (kesenjangan penelitian) dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menghubungkan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
3. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
4. Apakah pertemuan dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
5. Apakah pertemuan komite audit mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
6. Apakah pertemuan dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
7. Apakah kepemilikan blockholder mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
4. Untuk menganalisis pengaruh petemuan dewan komisais terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
5. Untuk menganalisis pengaruh petemuan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan blockholder terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

perusahaan, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar modal.

3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan *principal* dengan *agent*. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). *Principal* mendelagasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*) sesuai dengan kontrak kerja. Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab *agent* dan *principal* diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggungjawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai *agent* akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja *agent* untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada *agent* untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja *agent* yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh *principal* tidak memuaskan, *principal* dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Pihak *agent* sebagai pemegang kunci informasi dan *principal* sebagai penerima informasi dari *agent* dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetri*), yaitu suatu kondisi di mana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak *principal* secara umum tidak seimbang.

Menurut Jensen and Meckling (1976), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu :

1. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

2. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Teori keagenan lebih menenkan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan *principal* dan *agent*. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang berisi gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban *principal* dan *agent*, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan dan meminimalisir biaya keagenan (*agency cost*).

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini, merupakan hal mendasar bagi praktek penerapan *Corporate Governance* secara luas. Hal ini dapat kita lihat dalam teori-teori yang melandasi pengertian mengenai perusahaan sebagai tempat penerapan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Perusahaan atau korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori *stakeholder* (*stakeholding theory*) (Tjager, 2003). *Shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory*, menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para *stakeholder* (*principal*) mendapatkan jaminan dan keyakinan bahwa manajer perusahaan (*agent*) akan memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak menyalahgunakan

wewenang atau menginvestasikan modal ke dalam proyek yang tidak menguntungkan. Dalam artian sempit, teori keagenan sebagai dasar penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan dan sebagai rujukan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Secara luas, *Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima tingkat pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan.

2.1.2 Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance

Terdapat banyak definisi tentang *corporate governance* (tata kelola perusahaan). *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut Griffin (2002) dalam Susiana dan Herawaty (2007) pengertian *corporate governance* adalah “*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making*”. Jadi menurut Griffin *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur pemegang saham, direktur maupun manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Ini berarti bahwa *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam (Boediono, 2005).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other

stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Jadi menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.

2.1.2.2 Asas *Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2006). Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki asas sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran, dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan (IICG, 2013).

2.1.2.3 Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut KNKG (2006) dalam Anggitasari (2012), maksud dan tujuan *good corporate governance* Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.2.4 Manfaat *Corporate Governance*

Priambodo dan Suprayitno (2007) dalam Purwaningtyas (2011) menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah (Daniri, 2005).
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama (Daniri, 2005).

3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham (Sutojo dan Aldridge, 2005).
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005).

Namun manfaat yang optimal dari *good corporate governance* ini tidak sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya (Purwaningtyas, 2011).

2.1.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-

pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, variabel mekanisme *corporate governance* yang ingin dikaji lebih dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Darwis, 2009 dalam Laila, 2011). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui

aktivitas evaluasi dan keputusan strategi. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi *mismanagement* yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya *mismanagement* menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

2.1.3.2 Ukuran Komite Audit

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5. Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris. Menurut Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) komite Audit dapat

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Komite audit juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.1.3.3 Aktivitas Komite Audit

Price Waterhouse Corporation merekomendasikan bahwa komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja bisa dilakukan dalam pertemuan-pertemuan rutin komite audit. Pertemuan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit

bersidang dua sampai tiga kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sebelum laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan.

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Menurut Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (KNKCG, 2002), rapat dan pertemuan Komite Audit perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite harus bertanggungjawab atas agenda dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan.

1. Komite Audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan.
2. Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat ini, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan audit eksternal.
3. Rapat harus diadakan sesuai agenda yang telah disepakati.
4. Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan dibagi-bagikan kepada para peserta rapat semuanya.

Sedangkan Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003 tentang pedoman komite audit dalam mengadakan pertemuan menyebutkan bahwa ketentuan rapat komite audit sebagai berikut :

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota komite yang hadir;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Dalam FCGI 2002 dijelaskan bahwa komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktifitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan

perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal (FCGI,2002).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya dalam suatu perusahaan.

2.1.3.4 Large Blockholder

Elemen keempat dari mekanisme GC adalah berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan saham, yang dalam hal ini berkaitan dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar. Konsentrasi yang besar dari kepemilikan saham cenderung menciptakan lebih banyak tekanan terhadap manajer untuk

memaksimalkan nilai. Dalam mendukung hal ini, Sheifer dan Vishney (1997) menunjukkan bahwa tingkat pada konsentrasi kepemilikan yang rendah, sebuah kenaikan konsentrasi kepemilikan saham akan meningkatkan nilai perusahaan namun pada konsentasi yang tinggi hubungan menjadi negatif. Penelitian lain yang dilakukan Sheehan (1988) melapokan bukti hubungan positif antara konsentrasi kepemilikamn saham dengan kinerja.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya.

2.1.5 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang diukur dengan standar. Pratiwi (2012) menyatakan kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti

biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya.

Dalam mewujudkan visi dan misi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu yaitu dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membuahkan hasil dan tindakan yang diharapkan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau *variable* untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Selain itu juga dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu.

Kinerja keuangan sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama periode tertentu. Terdapat lima jenis rasio keuangan menurut James dan John (2005) dalam Rini (2012), yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Terdapat dua jenis pengukuran rasio likuiditas, yaitu:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai rasio lancar maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihan.

- b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan ukuran yang lebih konservatif dari pengukuran likuiditas. Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio ini berfungsi sebagai pelengkap rasio lancar (*current ratio*) dalam menganalisis likuiditas.

2. Rasio *Leverage* Keuangan

Rasio *leverage* ini merupakan rasio utang, digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang untuk dipinjam. Terdapat dua jenis rasio *leverage*, yaitu:

a. *Debt-to-equity*

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang perusahaan termasuk kewajiban jangka pendeknya dengan ekuitas pemegang saham.

b. *Debt-to-total asset*

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total hutang perusahaan dengan total aktivasinya.

3. Rasio *Coverage*

Rasio ini di desain untuk menghubungkan berbagai beban keuangan perusahaan dengan kemampuannya untuk membayarnya. Perhitungan rasio ini adalah membandingkan laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) dengan beban bunganya. Secara umum, semakin tinggi tingkat rasionya, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa kesulitan. Rasio ini juga menekankan pada kemampuan perusahaan untuk mengambil utang baru.

4. Rasio Aktivitas

Disebut juga rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivasinya. Beberapa aspek dari

analisis aktivitas sangat dekat hubungannya dengan analisis likuiditas.

Rasio aktivitas terdiri dari:

a. Rasio Perputaran Piutang

Rasio ini memberikan pandangan mengenaikualitas piutang perusahaan dan seberapa berhasilnya perusahaan dalam penagihannya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi piutang ke dalam penjualan kredit tahunan.

b. Rasio Perputaran Persediaan

Rasio ini digunakan untuk membantu menentukan seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola persediaan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan.

c. Rasio Perputaran Total Aktiva

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi relative total aktiva untuk menghasilkan penjualan.

5. Rasio Profitabilitas

Terdiri dari dua jenis rasio:

a. Profitabilitas kaitannya dengan penjualan, terdiri dari:

1) Rasio margin laba bersih

Merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.

2) Rasio margin laba kotor

Rasio ini menginformasikan laba dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, setelah mengurangnya dengan biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Rasio ini adalah pengukur efisiensi operasi perusahaan, serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya.

- b. Profitabilitas kaitannya dengan investasi, terdiri dari:
 - 1) Tingkat pengembalian atas investasi (*Return on Investment-ROI*) atau tingkat pengembalian atas aktiva (*Return on Asset-ROA*)
 - 2) Tingkat pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity-ROE*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Klapper dan Love (2002). Dalam penelitian tersebut ditemukan bukti bahwa adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan Tobin's Q.

Ana (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah mekanisme *monitoring* organisasi (rangkap kepemimpinan dewan direksi dan dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen), mekanisme insentif manajemen (kompensasi manajemen), dan mekanisme

struktur kepemilikan (kepemilikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan institusional).

Pranata (2007) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan menerapkan *good corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap *Return on Equity* (ROE), Tobin's Q, dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap ROE, Tobin's Q, dan NPM.

Achchuthan dan Kajanathan (2012) melakukan penelitian tentang praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo pada tahun 2007-2011. Dalam penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sedangkan variabel independennya adalah praktik *corporate governance* yang diprosikan oleh struktur kepemimpinan dewan, dewan komite, rapat direksi, dan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik *corporate governance*.

Hidayah (2007) melakukan penelitian mengenai *corporate governance*, pengungkapan informasi, dan kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi.

Penelitian ini memasukkan pengungkapan informasi sebagai variabel *intervening* yang memediasi pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung.

Sam'ani (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh elemen-elemen dalam penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan perbankan selama periode 2004-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio *leverage* mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para *principal*.

Setiyarini dan Purwanti (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan, dan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Manajemen laba diukur dengan menggunakan akrual diskresioner dari model Jones yang dimodifikasi dan kinerja perusahaan dengan Tobin Q. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2006-2008 dengan jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh.

Prayudhanto (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel, yaitu: *corporate governance* (sebagai variabel independen), kinerja perusahaan (sebagai variabel dependen), dan ukuran perusahaan (sebagai variabel kontrol). Untuk variabel independen digunakan *proxy*: ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan *leverage*. Untuk variabel dependen digunakan *proxy*: ROA dan Tobin's Q. Sedangkan untuk variabel kontrol digunakan *proxy* logaritma natural dari total penjualan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terpilihlah 47 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (dari 100 perusahaan publik terbaik versi Majalah Investor, Mei 2009) dengan periode pengamatan antara tahun 2004 hingga 2008. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q.

Sibarani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, variabel independennya mekanisme *corporate governance* yang diprosikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit, sedangkan variabel interveningnya adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan; kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh baik terhadap manajemen laba maupun kinerja keuangan; dan komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi tidak terhadap kinerja keuangan.

Sekaredi (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Indikator mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional dengan Tobin's Q yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pasar dan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA) sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh

negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.

Bukhori (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan *CFROA*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Rini (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, 2009, 2010. Sampelnya berjumlah 171 perusahaan manufaktur. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan tingkat profitabilitas sedangkan variabel independennya adalah *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh pemegang saham institusi, komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PS

(Pemegang saham institusi) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, KI (Komisaris independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, dan Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Pratiwi (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perbankan umum di Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional di Indonesia yang berjumlah 18 sampel bank umum. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota dewan direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Sampel penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sam'ani (2008)	Perusahaan perbankan 2004 – 2007	Variabel independennya adalah <i>corporate governance</i> yang diproksi oleh aktivitas komisaris, komisaris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit

			independen, ukuran dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan rasio leverage Variabel dependen: kinerja perusahaan	mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan <i>good corporate governance</i> dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.
2	Prayudhanto (2009)	47 Perusahaan public terbaik 2004 – 2008	<i>Corporate governance</i> (sebagai variabel independen), kinerja perusahaan (sebagai variabel dependen), dan ukuran perusahaan (sebagai variabel kontrol). Untuk variabel independen digunakan <i>proxy</i> : ukuran dewan komisaris, proporsi	Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang

			komisaris independen, dan <i>leverage</i> . Untuk variabel dependen digunakan <i>proxy</i> : ROA dan Tobin's Q. Sedangkan untuk variabel kontrol digunakan <i>proxy</i> logaritma natural dari total penjualan.	diukur dengan ROA, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Secara umum, dengan masih terkonsentrasinya struktur kepemilikan perusahaan publik maka hanya mekanisme kontrol internal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia.
3	Sibarani (2010) ⁴	Perusahaan manufaktur 2007-2009	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit Variabel intervening: manajemen laba.	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan; kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh baik terhadap manajemen laba maupun kinerja keuangan; komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi tidak terhadap kinerja keuangan; manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
4	Bukhori (2012)	Perusahaan manufaktur	Variabel dependen: kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		2009-2011	perusahaan diukur dengan <i>CFROA</i> . Variabel independen: ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan	tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
5	Rini (2012)	Perusahaan public di BEI 2008-2010	Variabel independen: pemegang saham institusi, komisaris independen, dan komite audit Variabel dependen: kinerja keuangan tingkat profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PS (Pemegang saham institusi) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, KI (Komisaris independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.
6	Pratiwi (2012)		Variabel independen: <i>corporate governance</i> yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota dewan

			diproksikan oleh Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional Variabel dependen: kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA.	direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).
--	--	--	---	--

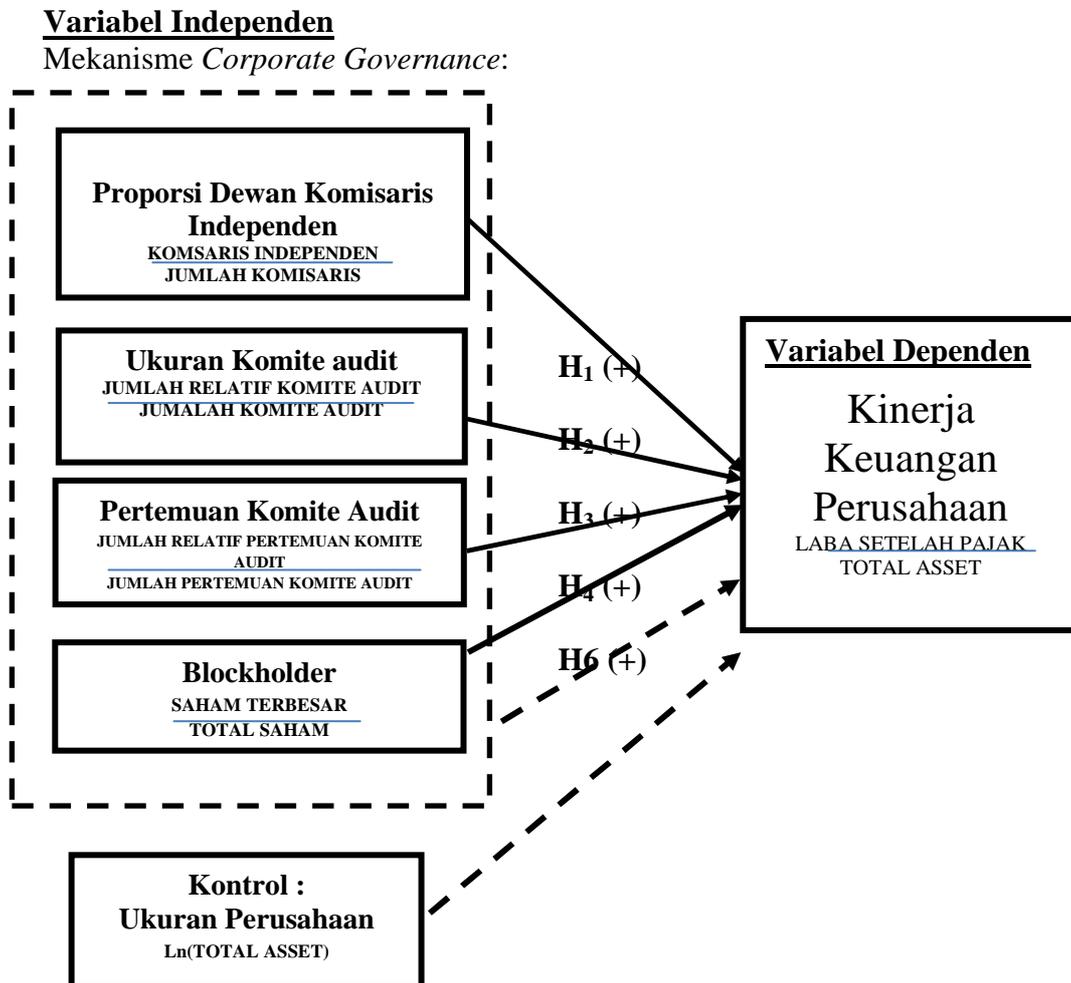
Sumber: Berbagai Jurnal dan Skripsi

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)* dan 4 variabel independen yang merupakan mekanisme dari *corporate governance* yaitu ukuran, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, aktivitas komite audit dan *block holder*.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Terdapat empat hipotesis dalam penelitian ini yaitu: (i) Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (ii) Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (iii) Ukuran komite audit memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (iv) Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan . Pembahasan terperinci mengenai rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Permasalahan agen dan prinsipal muncul karena perbedaan kepentingan keduanya sehingga dalam sebuah perusahaan diperlukan adanya pihak yang secara independen mengawasi kinerja manajemen agar tidak merugikan kepentingan pemegang saham. Komisaris Independen merupakan pihak yang dapat berperan sebagai pengawas manajemen dalam melaksanakan sistem *corporate governance*. Dalam perspektif keagenan kemampuan dewan komisaris dalam mekanisme pengawasan yang efektif tergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley, 1996).

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak

manajer (Darwis, 2009 dalam Laila, 2011). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi *mismanagement* yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya *mismanagement* menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yaitu Setiyarini dan Purwanti (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rini (2012) dan Choi, Park, and and Yoo (2006 dalam Pratiwi, 2012), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya masalah agensi. Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik,

sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Menurut Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) komite audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan yaitu Sam'ani (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rini (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA.

Effendi (2005) menyimpulkan keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan

semakin efektif. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam mekanisme *corporate governance* yang baik. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.4.3 Pengaruh Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Rapat dan pertemuan komite audit penting artinya bagi keberhasilan kerja komite audit. Frekuensi pertemuan komite audit harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan, KNKCG (2002). Menon dan Williams dalam Pamudji (2010) berpendapat bahwa komite audit yang tidak aktif tidak memungkinkan untuk memonitori manajemen secara efektif. Beasley (2004) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian Pamudji (2010) menunjukkan frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba yang berakibat kesulitan keuangan.

H3: Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.4.4 Pengaruh Large Blockholder terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Secara teoritis hubungan antara pemegang saham mayoritas dan nilai perusahaan adalah membingungkan. Jika *blockholder ownership* rendah maka

pihak mayoritas akan mengambil alih pemegang saham minoritas (Fama & Jensen, 1983; Morck *et al*, 1988; Sheleifer & Vishny 1997).

Large Blockholders ownership menunjukkan kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Sheifer dan Vishney (1997) menunjukkan bahwa tingkat pada konsentrasi kepemilikan yang rendah, sebuah kenaikan konsentrasi kepemilikan saham akan meningkatkan nilai perusahaan namun pada konsentasi yang tinggi hubungan menjadi negatif. Penelitian lain yang dilakukan Sheehan (1988) melapokan bukti hubungan positif antara konsentrasi kepemilikamn saham dengan kinerja.

H4: *Blockholder* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

H5: Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Aktivitas Komite Audit Dan Pemegang saham terbesar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan, membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Secara umum dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA (*Return on Assets*). ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total assets. ROA mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan.

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai variabel yang menunjukkan kinerja perusahaan karena ROA merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. *Return on Asset* (ROA) dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset yang ada dalam perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik karena akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk memperoleh nilai ROA dapat dihitung dengan rumus (Rini, 2012):

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{TOTAL ASET}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proporsi dewan Komisaris Independen

Ukuran komisaris independen diukur berdasarkan persentase komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris (Rini, 2012) .

2. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan (Bukhori, 2012). Pengukurannya adalah sebagai berikut:

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

3. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Rini, 2012). Pengukurannya adalah sebagai berikut:

Ukuran komite audit = Jumlah komite audit perusahaan

4. Aktivitas Pertemuan Dewan Komisaris

Pertemuan dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pertemuan anggota dewan komisaris secara resmi. Pengukurannya adalah sebagai berikut (Puspitasari, 2010):

Pertemuan dewan komisaris = Jumlah pertemuan komisaris

5. Aktivitas Pertemuan Komite Audit

Pertemuan Komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pertemuan anggota komite audit secara resmi. Pengukurannya adalah sebagai berikut (Puspitasari, 2010):

Pertemuan komite audit = Jumlah pertemuan komite audit.

6. Large Blockholder

Large Blockholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan pengendali. Pengukurannya adalah sebagai berikut (Puspitasari, 2010):

$$BLOCK = \frac{\text{Jumlah saham perusahaan pengendali}}{\text{Total saham}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini memiliki satu variabel kontrol yaitu size. Tujuan penggunaan variabel kontrol adalah mengendalikan pengaruh faktor-faktor yang mengacaukan analisis.

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dimaksud disini adalah seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan disini diukur dengan menggunakan proksi total aset yang ada dalam perusahaan (Bukhori, 2012)

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Dimensi	Pengukuran	Skala
Kinerja Perusahaan(Y)	Kinerja (Rini, 2012)	$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total asset}}$ (Rini, 2012)	Rasio
Proporsi dewan komisaris independen(X1)	Good Corporate Governance (GCG) (Rini, 2012)	$COMINDEP = \frac{\text{Komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris}}$ (Rini, 2012)	Rasio
Ukuran komite audit(X3)	Good Corporate Governance (GCG) (Rini, 2012).	$AC = \frac{\text{komite audit}}{\text{Jumlah komite audit}}$ (Rini, 2012).	Rasio
Aktivitas pertemuan komite audit(X4)	Good Corporate Governance (GCG) (Puspitasari, 2010)	$ACMEET = \frac{\text{Pertemuan Komite Audit}}{\text{Jumlah pertemuan komite audit}}$ (Puspitasari, 2010)	Rasio
Large blockholder(X5)	Good Corporate Governance (GCG) (Puspitasari, 2010)	$BLOCK = \frac{\text{Saham terbesar}}{\text{Total sanam}}$ (Puspitasari, 2010)	Rasio
Ukuran perusahaan	Laporan posisi keuangan (Bukhori, 2012)	$SIZE = \text{Ln (total asset)}$ (Bukhori, 2012)	nominal

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dengan tujuan penelitian dan relatif dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten pada tahun 2011-2012
2. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah, karena jika menggunakan mata uang asing maka akan terjadi perbedaan penilaian kinerja keuangan yang disebabkan oleh perbedaan kurs saat ini dengan kurs pada tahun yang diteliti yaitu tahun 2011-2012.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam *annual report*, yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, pada tahun 2011-2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan berupa laporan tahunan atau *annual report*. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2003). Laporan tahunan atau

annual report diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik, sedangkan variabel non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi berganda. Hal ini disebabkan karena penelitian ini terdapat lebih dari 1 variable independen dengan 1 variable dependen. Untuk dapat melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Syarat asumsi klasik tersebut agar menjadi model persamaan estimasi yang baik, yaitu:

1. Error menyebar normal atau data berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan memiliki suatu ragam (variance) tertentu yang diketahui melalui uji normalitas.
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam error sehingga bersifat homoskedastis.
3. Tidak terjadi multikolinieritas antara variable bebas yang diketahui melalui uji multikolinier.
4. Error tidak mengalami autokorelasi (error tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal.

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2006):

1. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi membentuk pola tertentu yang teratur. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat menggunakan Uji *Glejser*. Uji ini menggunakan nilai absolute dari residual dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2006) mengatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hamper sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas untuk *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2006). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan $t-1$ (sebelumnya). Jika

ya, maka terdapat masalah autokorelasi yang muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Gejala ini menimbulkan konsekuensi yaitu interval keyakinan menjadi lebih lebar serta varians dan kesalahan standar akan ditafsir terlalu rendah. Data yang baik adalah terbebas dari autokorelasi (acak atau *random*). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* dan *Runs test*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_1, H_2, H_3, H_4) menggunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDSIZE} + \beta_2 \text{COMINDEP} + \beta_3 \text{AC} \\ + \beta_4 \text{COMMEET} + \beta_5 \text{ACMEET} + \beta_6 \text{BLOCK} + \beta_7 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Dimana:

ROA = *Return on Assets*

$COMINDEP$ = *komisaris independen*

$BOARDSIZE$ = *dewan komisaris*

AC = *komite audit*

$COMMEET$ = *aktivitas dewan komisaris*

$ACMEET$ = *aktivitas komite audit*

$SIZE$ = *logaritma natural ukuran perusahaan*

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi

$\varepsilon = \text{error}$

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t).

3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen (*goodness of fit*), yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R^2). Ghozali (2006) mengatakan Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Ghozali (2006) mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai *adjusted R²* dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif. Apabila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- i. Quick Look: Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- ii. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif (H_A) diterima.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- i. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ii. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.